



Pengelolaan Informasi Publik di Tinjau dari Perspektif *Good Governance* di Kabupaten Bengkalis

Junia Astuti¹, Hasim As'ari², Adianto³, Nurul Anjani⁴

¹Mahasiswa Pasca Administrasi Publik Universitas Riau

^{2,3}Dosen Pasca Administrasi Publik Universitas Riau

⁴Alumni Pasca Sosiologi Universitas Riau

Abstract

Received: 01 Juni 2024
Revised: 08 Juni 2024
Accepted: 15 Juni 2024

This research is motivated by Public Information Openness (KIP) in Bengkalis Regency which has obligations and challenges in meeting the public information needs of its entire community. The problem of implementing KIP democratically in Bengkalis Regency stems from the mental readiness of regional officials or public bodies as well as the readiness of the community to truly maximize the function of supervision and participation in order to realize good governance. The aim of this research is to analyze and explain the management of public information from the perspective of good governance and the obstacles faced as well as the efforts made in managing public information at the Bengkalis Regency Communication and Information Technology Department. This research uses a qualitative research method with an explanatory phenomenological approach. . The primary data was obtained directly through interviews from informants, namely the head of the Bengkalis district communications and information services department, secretaries, public information management and services (PPID) staff, heads of communications and information resources, heads of electronic-based management, journalists, non-governmental organizations (LSM) and society. The results of this research show that the management of public information within the Bengkalis Regency Government which is handed over to the Bengkalis Regency Diskominfo Public Agency as the Main PPID, viewed from a good governance perspective, consists of 4 (four) principles, namely accountability, transparency, participation and professionalism. Globally, the four principles of good governance have been implemented by diskominfo, although not yet optimally because there are several obstacles from both internal and external parties. However, efforts are still being made by diskominfo to prevent obstacles from emerging which aim to improve the government system so that the Bengkalis can be realized with dignity, progress and prosperity (Bermasa).

Keywords: Management, public information, good governance

(*) Corresponding Author: rindianinrfhm@gmail.com

How to Cite: Astuti, J., As'ari, H., Adianto, A., & Anjani, N. (2024). Pengelolaan Informasi Publik di Tinjau dari Perspektif Good Governance di Kabupaten Bengkalis. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12786669>.

PENDAHULUAN

Kabupaten Bengkalis bertanggung jawab penuh untuk memelihara informasi yang komprehensif. Tekad dan dorongan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan informasi publik sejalan dengan upaya



Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Informasi, Komunikasi dan Statistik (Diskominfo) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja lembaga publik di wilayah Bengkalis. Hal ini tentang memberikan keterbukaan informasi publik (KIP) yang berkualitas, transparan, terukur, terarah dan akuntabilitas. Evaluasi ini berupa Penghargaan Self-Assessment Questionnaire (SAQ) Tahun 2022 yang diserahkan pada Rabu, 26 Oktober 2022 oleh Bapak Kasmaruni, Bupati Bengkalis kepada Bupati Bengkalis Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Rahman, 2000).

Keterbukaan Informasi (KIP) Kabupaten Bengkalis mengenai informasi yang diberikan dan diungkapkan Tahun Anggaran 2022. Dapat diakses melalui situs resmi Direktur Informasi dan Dokumen (PPID) Kabupaten Bengkalis. <https://ppid.bengkalis.go.id/> (Bengkalis, 2022) Bupati Bengkalis wajib memberikan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara berkala dan berkala.

Dalam hal ini tentu saja harus bekerja sama dengan semua badan publik lainnya untuk meningkatkan transparansi publik. Kebutuhan informasi tidak hanya didominasi oleh satu hal tertentu, namun ada hubungan-hubungan yang mencapai tujuan yaitu terciptanya informasi yang utuh tergantung pada tingkat kebutuhannya. Pada Senin, 12 Desember 2022, Kabupaten Bengkalis kembali meraih penghargaan tingkat I Kategori Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik pada Penghargaan Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau Tahun 2022 (Rahman, 2022).

Informasi yang perlu segera diungkapkan di Kabupaten Bengkalis sangat penting bagi seluruh masyarakat. Tujuan dari informasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat agar dapat mengantisipasi akibat atau dampak negatifnya. Informasi ini mencakup langkah-langkah untuk mempersiapkan diri dan apa yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat atau bahaya, prosedur dan lokasi evakuasi, serta cara mencari bantuan.

Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk proaktif memberikan informasi melalui sarana yang tepat setiap saat. Jika kami menerima permintaan informasi ini, maka informasi tersebut akan dipublikasikan. Informasi yang terbuka menumbuhkan partisipasi luas dan rasa kepemilikan yang kuat dalam inisiatif pembangunan. Informasi yang terbuka memastikan pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang kuat. Keterbukaan informasi juga akan membantu pembangunan Kabupaten Bengkalis mencapai tujuan yang direncanakan.

Keberhasilan ini merupakan peluang besar dan landasan pertama bagi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bengkalis. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Bengkalis. Visi Kabupaten Bengkalis adalah mewujudkan Kabupaten yang mulia, maju dan sejahtera.

Adanya transparansi atau keterbukaan baik di pemerintah pusat maupun daerah, yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat. Permasalahan pelaksanaan KIP secara demokratis di Kabupaten Bengkalis bermula dari pola pikir pejabat daerah dan badan publik serta kemauan masyarakat untuk benar-benar memaksimalkan fungsi pengawasan dan partisipasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

(Jeff, Huther, dan Shah, 1998) mendefinisikan governance sebagai "sebuah konsep multifaset yang mencakup seluruh aspek pelaksanaan

kewenangan oleh lembaga formal dan informal dalam pengelolaan sumber daya alam suatu negara. (Bank, 2007) mendefinisikan governance sebagai: “Bagaimana pejabat dan lembaga menyediakan barang dan jasa” Sementara itu, Tokyo Institute of Technology dalam (As'ari, 2020) menyebutkan konsep tata kelola mengacu pada serangkaian nilai, norma, proses, dan institusi kompleks yang memandu pembangunan masyarakat dan menyelesaikan konflik, baik secara formal maupun informal. Hal ini tidak hanya menyangkut negara, tetapi juga masyarakat sipil (aktor ekonomi dan sosial, lembaga dan kelompok terorganisir berbasis komunitas, media, dan lainnya) di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.

Asian Development Bank (ADB) dalam (Nasional, 2021) mengidentifikasi empat elemen mendasar tata kelola yang baik: akuntabilitas, partisipasi, prediktabilitas, dan transparansi. Di sisi lain (Banga, 2017) adalah partisipasi, penegakan hukum, transparansi, keadilan, kesegeraan, kesadaran masa depan, akuntabilitas, pengawasan publik, efektivitas dan efisiensi, dan profesionalisme.

Good governance atau tata kelola yang baik merupakan isu terpenting dalam administrasi publik saat ini (Negara, 2000). Governance dapat diartikan sebagai cara mengatur urusan publik. Lebih jauh lagi, menurut (Rosenbloom, 2005) meskipun kinerja yang buruk merupakan masalah potensial, ada tiga jenis pelanggaran administratif lainnya yang menimbulkan kekhawatiran lebih besar dalam hal etika dan akuntabilitas. Ini adalah kesalahpahaman tentang korupsi dan subversi terhadap kepentingan publik.

Berdasarkan UNDP, World Conference on Governance 1999 (Sedarmayanti, 2012) governance secara umum didefinisikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang mereka layani dan lindungi. Tata kelola mencakup tiga bidang: negara (negara/pemerintah) dan sektor swasta (sektorswasta/dunia usaha) dan masyarakat (*society*). Tata pemerintahan yang baik sering kali diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Tata kelola yang baik mempunyai dua arti (BPKP, 2002) yaitu:

- a. Nilai-nilai yang melindungi keinginan masyarakat dan dapat meningkatkan kemampuannya dalam mencapai tujuan nasional yaitu kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial;
- b. Aspek fungsional pemerintahan yang melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tersebut.;

(Soepomo, 2000) menggambarkan istilah 'good governance' sebagai pemerintahan yang baik yang profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil dalam menjalankan fungsinya serta dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memberantas KKN dan meningkatkan kinerja pemerintah. Menurut (*PERMENPANRB NO 04 TAHUN 2007.Pdf*, n.d.), tata pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Pengelolaan informasi publik di Kabupaten Bengkalis menunjukkan masih adanya sebagian masyarakat yang kesulitan dalam mengakses informasi khususnya di SKPD atau PPID Pemoh. Buruknya jaringan internet di beberapa daerah dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi publik membuat masyarakat sulit mengaksesnya. Beberapa staf tidak

menguasai teknologi layanan informasi, dan tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan amanah PPID secara keseluruhan. Penyediaan website resmi masih enggan di beberapa daerah dan memerlukan perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Permasalahan yang dihadapi menjadi tantangan besar dalam mencapai akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan profesionalisme dalam pengelolaan informasi publik.

METODE

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan informasi deskriptif. Jenis penelitian ini mempunyai tahapan-tahapan penelitian yang melampaui berbagai tahapan berpikir ilmiah kritis, dan peneliti mulai berpikir secara induktif, yaitu melakukan observasi. Penyelidikan dilakukan di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan untuk mendapatkan informan penelitian ini adalah metode tertarget. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap informan. Subyek pemeriksaan adalah Kepala Diskominfo Kabupaten Bengkalis, Sekretaris, Kepala Bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik (PPID, Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Kepala Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik, wartawan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat. Analisis data kemudian dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

HASIL & PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Informasi Publik di Tinjau dari Perspektif *Good Governance* Di Diskominfo Kabupaten Bengkalis

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan wujud tanggung jawab Diskominfo kepada masyarakat dalam hal penyediaan informasi publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Diskominfo yang ditunjuk sebagai PPID Utama Kabupaten Bengkalis memberikan informasi dengan dukungan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau biasa disebut PPID Pembantu (total 47 SKPD). Berdasarkan wawancara dengan staf PPID Shahri Yadna, MD, beliau menyatakan:

“Masing-masing PPID Pembantu berhak memberikan informasi yang bersifat publik sesuai dengan perundang-undangan No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik agar informasi publik tersebut bisa menjadi konsumsi bagi masyarakat yang memerlukan informasi. Pada tahun 2022 pernah Diskominfo mendapati ada 1 (satu) PPID Pembantu (tidak disebutkan nama PPID Pembantu yang bersangkutan) dengan sengaja tidak memberikan sebuah informasi yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) padahal berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik secara terang menyebutkan bahwa LAKIP

merupakan tergolong informasi publik". (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

Hal senada diungkapkan Sekretaris Discominfotik Kabupaten Bengkalis Adi Strisno SE., MAP, dengan mengatakan:

"Mengenai prosedur penyediaan dan penyebaran informasi, masih dikatakan sebagian informasi publik sudah kami usahakan berdasarkan prosedur perundangan-undangan yang berlaku walaupun juga masih ada informasi publik yang tidak sesuai prosedur. Meskipun hal itu, Diskominfotik juga terus melakukan perbaikan baik dalam hal pelayanan, penyediaan dan penyebaran informasi agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan". (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

Upaya penyediaan informasi Diskominfotik juga mencakup kerja sama dengan jurnalis yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan e-jurnalis melalui aplikasi yang dirancang khusus untuk optimalisasi media TI dan efektivitas kolaborasi dengan media massa: termasuk aplikasi e-jurnalis.



Gambar 5.1 Aplikasi e-wartawan

Sumber: Website Resmi PPID Kab. Bengkalis, 2023

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Wartawan, Umi Ria yang menerangkan bahwa:

"Pemerintah khususnya Diskominfotik bekerjasama dengan wartawan dalam hal untuk menjalankan amanahnya sebagai penyedia informasi publik. Seperti saya sendiri, yang dikontrak kan untuk menggali semua informasi publik di Desa. Di Pemkab Bengkalis di kenal dengan bantuan dana desa bermasa. Semua berita yang didapatkan di seluruh Desa Kabupaten Bengkalis ditampung, ditulis beritanya kemudian diinformasikan kepada publik guna sebagai pertanggungjawaban kami sebagai penyebar informasi". (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan temuan penelitian di atas, akuntabilitas pengelolaan informasi publik di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dalam penyampaian informasi kepada pelamar maupun dalam komunikasi melalui lembaga informasi. Ini proses yang sangat sederhana, tunggu saja. Hanya membutuhkan waktu tujuh (7) hingga sepuluh (10) hari kerja. Apabila proses pemberian informasi memakan waktu lebih dari 7 hari, Diskominfotik akan segera memberikan informasi publik yang diperlukan kepada pemohon. Selain itu, Diskominfotik bersama para jurnalis yang telah menandatangani perjanjian kerja sama juga memikul tanggung jawab bersama melalui aplikasi yang dirancang khusus untuk itu, yakni aplikasi e-jurnalis. Aplikasi jurnalis elektronik menjalin kerja sama dan kemitraan yang baik antara Diskominfotik dan pers, serta menjadi

sarana penyebaran informasi publik, baik mengenai program pembangunan maupun berbagai kebijakan lainnya.

b. **Transparasi**

Transparansi dapat diartikan sebagai langkah pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap informasi publik. Discomfotic memainkan peran penting baik dalam pemerintahan maupun kebijakan sosial sebagai penyedia informasi publik yang harus diperbarui dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Yuliana Shafitli, salah satu warga masyarakat yang memaparkan hal tersebut:

“Mengenai informasi publik pemerintah saat ini pemerintah sangat terbuka sekali baik dalam hal pembangunan, ekonomi, kebijakan dan lain sebagainya. Seluruh informasi bisa kami akses, terlebih melalui informasi publik disediakan dimedia sosial maka lebih mempermudah kami lagi selaku masyarakat”. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Mei 2023).

Upaya Diskominfotik menuju transparansi ini akan menjadi jalan pintas bagi seluruh SKPD untuk membantu pemerintah melihat apa yang terjadi pada SKPD yang bersangkutan, dan juga akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat umum tanpa menunggu permintaan Diskominfotik mulai lagi dengan mendorong terciptanya situs web resmi.



Gambar 5.7 Penyediaan Informasi Publik melalui website resmi
Sumber: Website Resmi PPID Kab. Bengkalis, 2023



Gambar 5.8 Penyediaan Informasi Publik secara langsung
Sumber: Kantor Desa Kelapapati Kab. Bengkalis, 2023

Dalam rangka memperkuat prinsip transparansi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau disebut good governance, Diskominfotik Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan kegiatan bernama Bengkalis Transparency Award (BTA) setiap tahunnya. Dalam hal ini, Hendrik Dowi Yatmoko, Direktur Pelayanan Discomfotics Kabupaten Bengkalis, menjelaskan:

“Kegiatan Bengkalis Transparansi Award (BTA) setiap tahunnya diselenggarakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kepatuhan kinerja seluruh badan publik terhadap keterbukaan informasi publik. BTA juga

mampu meningkatkan energi badan publik yang ada di lingkungan Pemkab Bengkalis untuk terus saling berlomba-lomba dalam memberikan informasi publik yang berkualitas, transparan, terukur. Terarah dan akuntabel. Selain itu juga Diskominfo sering melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk PPID Pembantu agar bisa menyajikan informasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”.(Hasil wawancara pada tanggal 28 Juni 2023).

Berdasarkan hasil peneliti di atas, Discomfotic Kabupaten Bengkalis bertujuan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan informasi publik di Kabupaten Bengkalis dengan memberikan informasi yang terbuka, terlihat dari situs resminya telah banyak digunakan berita TV/Radio. Dapat juga diakses secara manual melalui smartphone/ponsel atau laptop/komputer dan ditampilkan secara mencolok di tengah-tengah setiap elemen masyarakat. Masyarakat bebas menikmati informasi publik dari arah mana pun yang dianggap wajar dan dapat dimengerti.

c. Partipasi

Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena masyarakat merupakan sumber informasi utama mengenai kebutuhan dan kondisi yang mereka hadapi. Menurut hasil wawancara peneliti Shahri Yadna, MD khususnya staf PPID Kabupaten Bengkalis dan masyarakat yang menjelaskan hal tersebut:

“Dari tahun ke tahun perubahan kian dirasakan, kami sangat menantikan partisipasi dari masyarakat luas untuk ikutserta dalam pengelolaan informasi publik ini. Hampir seluruh daerah-daerah kami jelajahi dengan cara mengadakan sosialisasi, pelatihan, dan kami bimbing. Tentunya tidak mudah untuk kami lakukan, karna seperti yang kita ketahui ada sebagian masyarakat yang masa bodoh terhadap daerahnya. Hingga ketika kami mengajak berpartisipasi mereka menolak tetapi di belakang itu tidak hentinya mengomentari kebijakan pemerintah” (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

Hal ini juga diungkap Rezeki Hari Santoso, S.Sos dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang menerangkan bahwa:

“Pembentukam KIM di tengah-tengah masyarakat guna untuk memberdayakan masyarakat sebagai wahana informasi, komunikasi dan mitra dialog antara anggota KIM dengan pemerintah dan sebaliknya dalam merumuskan kebijakan publik. Sebagai pengelolaan informasi utama di Kabupaten Bengkalis, Diskominfo terus berupaya mengoptimalkan peran KIM dengan melakukan beberapa tindakan seperti sosialisasi pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis.”(Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil peneliti lakukan di atas, terlihat bahwa sangat diperlukannya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi publik di Kabupaten Bengkalis mengidentifikasi permasalahan, peluang, dan kebutuhan lokal.

d. Profesionalisme

Profesionalisme adalah suatu sikap yang menunjukkan kemampuan atau keahlian untuk melaksanakan suatu tugas dengan mutu yang efektif dan efisien menurut prosedur yang telah ditetapkan. Pendekatan profesional Diskominfo terhadap masyarakat dalam pelayanan publik merupakan profesional dalam membangun pemerintahan yang berkualitas. Selama ini Diskominfo mampu menunjukkan profesionalisme kepada masyarakat dan menjadi profesional dalam penciptaan prinsip-prinsip profesional. Termasuk juga pemberian informasi mengenai kerjasama dengan media massa.



Gambar 5.12 Pengajuan Permohonan Kerjasama Media Massa
Sumber: Website Resmi Diskominfo Kab. Bengkulu, 2023

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama Wartawan, Umi Ria yang menerangkan bahwa:

“Adanya pengumuman untuk pengajuan kerjasama dengan media massa maka itu mempermudah kami sebagai wartawan untuk melahirkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang bermartabat, berintegritas dan profesional merangkul dan menciptakan keharmonisan antar sesama media dalam menyajikan berita”. (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

Tekad Diskominfo dalam mengelola informasi publik melalui website merupakan bukti profesionalismenya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan peneliti dari Dinas Pengelolaan Basis Elektronik Diskominfo Kabupaten Bengkulu Zulkifli yang mengatakan:

“Pengelolaan berbasis elektronik mencakup 3 (tiga) seksi yaitu seksi aplikasi yang bertugas sebagai pelaksana penggabungan sistem manajemen database, layanan web, replikasi atau duplikat dan federasi sistem. Selanjutnya seksi telematika yang bertugas sebagai pelaksanaan pada bidang keamanan sistem informasi dan perangkat keras, perangkat lunak, bidang konten, serta pengembangan pada bidang e-government. Dan terakhir Seksi infrastruktur dan teknologi yang bertugas sebagai melaksanakan pembangunan dan pengembangan perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta sarana dan prasarana”. (Hasil wawancara pada tanggal 28 Juni 2023).

Berdasarkan hasil peneliti yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa perlunya tenaga profesional pengelola informasi publik di Kabupaten Bengkulu dalam menyediakan informasi publik. Diskominfo tidak pernah berhenti berkembang. Kami mengumpulkan semua informasi publik dan mendistribusikannya secara adil dan segera. Pemohon informasi juga bebas

menggunakan informasi tersebut dengan ketentuan berhak meminta informasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Informasi Publik Di Diskominfo Kabupaten Bengkalis

a. Kendala Akuntabilitas

1) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Diskominfo

Sumber daya manusia (SDM) merupakan garda terdepan keberhasilan pemerintahan. Sumber daya manusia yang memadai memungkinkan sistem pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Adi Strisno, SE., MAP, Sekretaris Kabupaten Bengkalis Discomfotics yang menjelaskan hal tersebut:

“Meskipun terkadang kewalahan dalam SDM Diskominfo yang tidak memadai tidak membuat kami berhenti semangat mempertanggungjawabkan tugas yang telah di amanatkan. Walaupun status masih sedikit aparat Diskominfo yang berstatus PNS, tetapi ada beberapa staff yang tingkat pemahaman nya dalam hal pengelolaan informasi sama dengan aparat-aparat yang PNS”. (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

Tanggung jawab Diskominfo tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi publik, namun tanggung jawab yang sama besarnya adalah melibatkan rekan-rekan Diskominfo dalam menjadikan Diskominfo sebagai lembaga publik yang intelektual. Kepemimpinan yang membuahkan hasil sesuai dengan tujuan awal tentu saja dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan misi masing-masing individu.

2) Kerjasama Antara Diskominfo Dengan Media Massa

Untuk menyebarkan informasi, program dan kebijakan pembangunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis berkolaborasi dengan media massa melalui discomfotics. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang lebih komprehensif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Dinas Pengelolaan Elektronik Diskominfo Kabupaten Bengkalis, jelas Zulkifli:

“Penyebaran berita yang salah oleh pihak media pers akan berdampak pengecoh masyarakat sebagai penerima informasi, masyarakat akan kebingungan kan kebenaran berita, hingga simpang siur pun terjadi. Maka Diskominfo juga berlu mengkaji selektif lagi dalam penentuan dengan perusahaan Pers sama untuk bekerja sama dalam hal penyediaan informasi publik”. (Hasil wawancara pada tanggal 28 Juni 2023).

Berdasarkan hasil yang telah peneliti lakukan di atas, maka kendala yang dihadapi Diskominfo dalam menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan informasi publik disebabkan oleh Dinas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis terlihat bahwa mempunyai kerjasama dengan peralatan informasi diskom dan pers. Talenta berkualitas yang tepat tidak hanya disiplin, tekun, pekerja keras dan terus mengembangkan kualitasnya, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional (EQ) yang baik. Kestabilan emosi yang positif memudahkan Diskominfo mencapai tujuan visi dan misi yang telah

dipublikasikan. Keputusan untuk bekerja sama dengan organisasi berita juga dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana, karena publikasi dan penyebaran berita dapat menimbulkan keributan, ketakutan, konflik, dan bahkan ujaran kebencian.

b. Kendala transparasi

1) Daerah Yang Sulit Terjangkau Akses Jaringan Internet

Menciptakan informasi publik yang terbuka agar dapat diakses seluas-luasnya oleh seluruh masyarakat, terutama yang berada di daerah tertinggal, merupakan sebuah tantangan besar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Hendrik Dwi Yatmoko, Direktur Layanan Discomfortics Kabupaten Bengkalis yang menjelaskan:

“Pekab Bengkalis mengarahkan agar setiap SKPD atau PPID Pembantu untuk segera turun ke daerah-daerah yang jauh dari akses internet melakukan penyajian informasi publik. Seperti di Rupal utara di Desa Titi akar tepatnya di Dusun Hutan Samak, minim akan akses internet hingga masyarakat disana kebingungan untuk mendapatkan informasi publik yang mereka butuhkan”. (Hasil wawancara pada tanggal 28 Juni 2023).

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Rezeki Hari Santoso, S.Sos yang menerangkan bahwa:

“Internet merupakan salah satu inovasi terbesar sepanjang masa dan berpotensi besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan setara. Dengan adanya akses internet di daerah-daerah terpencil dan tertinggal akan memiliki kesempatan mengakses informasi di seluruh dunia”. (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

Kesenjangan digital ini membuat mereka yang memiliki akses terhadap internet tidak bisa mengaksesnya dibandingkan mereka yang paling membutuhkan, sehingga melemahkan kondisi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesenjangan sosial. Situasi ini semakin diperburuk oleh keadaan di luar kendali masyarakat.

2) Pendidikan Masyarakat

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi hambatan bagi masyarakat sendiri dalam menerima informasi publik. Misi Diskominfo adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkannya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Direktur Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Dr. Saiful Bari yang menjelaskan hal tersebut bahwa:

“Di era globalisasi saat ini, dalam dunia pendidikan sangat diperlukan untuk menerima adanya pengelolaan informasi publik. Tentunya akan berpengaruh terhadap kemajuan teknologi serta menjadi peran penting dalam pemberdayaan sumber daya manusia”. (Hasil wawancara pada tanggal 28 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan penelitian dokumen yang telah peneliti lakukan di atas, kendala yang dihadapi Diskominfo dalam mewujudkan prinsip transparansi pengelolaan informasi publik di Kabupaten Bengkalis adalah minimnya akses terhadap internet, wilayah terbatas dan pendidikan masyarakat. Kurangnya akses internet di beberapa daerah memperlambat transmisi informasi dan implementasi perubahan berkelanjutan. Di

sisi lain, pendidikan masyarakat juga mempengaruhi pengelolaan informasi publik. Seseorang yang berpendidikan sama dapat menerima dan memahami informasi dengan lebih mudah dibandingkan orang awam lainnya.

c. Kendala Partisipasi

1) Ketidakpedulian Masyarakat

Ketidakpedulian masyarakat terhadap perkembangan serta kemajuan daerahnya suatu kesulitan yang di hadapi oleh pemangku kebijakan disaat mengajak untuk ikutserta dalam berpartisipasi. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Wartawan, Umi Ria yang menerangkan bahwa:

“Tantangan saat ini bukan hanya di hadapi soal prosesnya tetapi juga bagaimana membangun people atau masyarakat yang mau berpartisipasi dan inisiatif yang tinggi”. (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

2) PPID Pembantu

PPID Pembantu juga menjadi kendala dalam mewujudkan prinsip partisipasi antar sesama penyedia informasi publik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama Staff PPID, Syafri yadona, A.Md yang menerangkan bahwa:

“Partisipasi PPID Pembantu disebutkan wajibkan melaporkan dan menyerahkan setiap informasi publik kepada Diskominfo. Kerap kali ada beberapa PPID Pembantu yang tidak mau berpartisipasi aktif, seperti keterlambatan dalam penyampaian informasi hingga ada beberapa informasi yang sengaja dirahasiakan”. (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil yang telah peneliti lakukan di atas, maka kendala yang dihadapi oleh para discomifotics dalam mewujudkan prinsip partisipasi dalam pengelolaan informasi publik di Kabupaten Bengkulu adalah menunjukkan bahwa masyarakat acuh tak acuh dan PPID proksinya. Sikap apatis masyarakat berarti tidak mengetahui atau tidak ingin mengetahui proses pengelolaan informasi, namun hanya menginginkan perubahan segera. Ketidakpedulian yang ditunjukkan masyarakat Kabupaten Bengkulu ini berdampak buruk terhadap pembangunan daerahnya masing-masing. Daerah tersebut akan tertinggal dibandingkan daerah lain yang lebih mudah membuka diri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Kendala juga muncul dari keengganan PPID sekunder untuk bekerja sama dengan PPID primer dalam pengelolaan informasi publik. Keterlambatan penyampaian informasi yang disengaja akan mempengaruhi nilai kinerja PPID yang bersangkutan, dan jika pelayanan informasi tertunda tanpa alasan pemerintah.

d. Kendala Profesionalisme

1) Kurangnya Alokasi Dana

Masih kurangnya alokasi dana menimbulkan aparat tidak bekerja secara profesional. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama Staff PPID, Syafri yadona, A.Md yang menerangkan bahwa:

“Anggaran atau dana merupakan sub terpenting dan juga sangat sensitif selalu untuk dibahas, namun kurang alokasi dana maka menjadi kendala kami untuk menjalankan tugas. Seperti pengadaan pelatihan atau sosialisasi ke desa-desa hingga memakai biaya yang cukup besar, sarana

dan prasarana untuk penyedia informasi publik yang kian hari kian banyak dibutuhkan. Hendaknya pemerintah segera mengupgrade anggaran sesuai dengan kebutuhan saat ini". (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

Tidak terealisasinya kegiatan yang dikarenakan kekurangan anggaran bisa dikarenakan lemahnya perencanaan yang sering memakai waktu lama hingga menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya menjadi target realisasi anggaran tidak tercapai. Perencanaan anggaran yang kurang tepat akan menyulitkan pembahasan dalam pengelolaan informasi

2) Keterbatasan Komunikasi

Formalitas dalam konteks tertentu dapat mempengaruhi cara berkomunikasi dengan seseorang baik dari gaya berkomunikasi antar atasan dan bawahan di lingkungan kerja Diskominfo. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bengkalis, Adi Sutrisno, SE., M.AP yang menerangkan bahwa:

"Miskomunikasi atau keterbatasan dalam berkomunikasi bisa menimbulkan perdebatan dan ketidakharmonisannya rumah tangga pemerintahan, terkadang tidak memahami apa yang disampaikan, kemudian adanya asumsi yang melebih-lebihkan dan mengurang-ngurangi apa yang disampaikan membuat informasi tersebut harus diluruskan kembali". (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil peneliti yang telah diuraikan di atas, maka kendala yang dihadapi oleh Diskominfo dalam mewujudkan prinsip profesionalisme pengelolaan informasi publik Kabupaten Bengkalis adalah melihat kurangnya penugasan dan terbatasnya komunikasi. Akibat keterbatasan dana di Diskominfo, beberapa rencana aksi terpaksa ditunda, padahal rencana aksi tersebut merupakan prioritas dalam mewujudkan kebebasan informasi di Kabupaten Bengkalis.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Diskominfo Kabupaten Bengkalis Dalam Pengelolaan Informasi Publik

a. Upaya Akuntabilitas

1) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Diskominfo

Sumber daya manusia Diskominfo merupakan sumber daya yang memiliki kecerdasan dan keterampilan untuk memperoleh keunggulan kompetitif sehingga kita dapat melakukan perubahan pada sistem pemerintahan. Faktor utama yang mempengaruhi sumber daya manusia adalah pendidikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bengkalis Adi Sutrisno SE, M.ap yang menjelaskan hal tersebut bahwa:

"Menyadari masih lemahnya SDM Diskominfo hingga membuat target-target yang ingin kami capai harus tertunda. Maka itu gunanya nanti kami membuka peluang kami seluruh anak daerah untuk bisa bergabung di rumah tangga Diskominfo menjadi pengelola informasi yang baik sesuai aturan". (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik Diskominfo Kabupaten Bengkalis, Zulkifli yang menerangkan bahwa:

“Setiap pagi kita melakukan briefing kerja di Diskominfo, saling mengingatkan dan menegaskan tugas dan fungsi masing-masing. Selain briefing juga kami mengantarkan karyawan-karyawan kami untuk ikut pelatihan penguatan kinerja guna menambah wawasan pengetahuan masing-masing”. (Hasil wawancara pada tanggal 28 Juni 2023).

Dimungkinkan untuk menjalin hubungan dengan pendidikan dan pelatihan personel di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai badan utama dalam penyediaan, pengelolaan dan penyebaran informasi publik, memfasilitasi pengenalan informasi dan administrasi pemerintahan yang lebih cepat, dan dapat memberikan informasi proaktif dengan partisipasi untuk memajukan komunitas. Manfaatnya bagi masyarakat tidak hanya terbatas pada sistem tanggung jawab, namun terletak pada perspektif yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

2) Kerjasama Antara Diskominfo Dengan Media Massa

Media massa merupakan selaku penyebar atau pengirim informasi-informasi kepada masyarakat luas. Informasi-informasi tersebut haruslah berdasarkan informasi yang jelas, mudah difahami, dan tidak ada unsur-unsur *hoax*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik Diskominfo Kabupaten Bengkalis, Zulkifli menerangkan bahwa:

“Salah satu upaya yang bisa kami lakukan adalah dengan melakukan seleksi yang sangat sangat selektif kepada media massa yang terdaftar sebagai peserta pengajuan kerjasama. Seleksi ini bertujuan untuk mencari yang benar-benar unggul sesuai dengan persyaratan mitra publikasi”. (Hasil wawancara pada tanggal 28 Juni 2023).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Wartawan, Umi Ria yang menerangkan bahwa:

“Adanya seleksi kerjasama pers sangat membantu memenuhi masyarakat tentang informasi penyelenggaraan Pemkab Bengkalis agar lengkap tersaji. Untuk tahun 2023 ini, perusahaan pers yang ingin mengajukan kerjasama dengan Pemkab Bengkalis melalui Diskominfo harus mengajukan proposal yang diterima selambat-lambatnya hingga 31 Januari 2023”. (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti di atas, upaya Diskominfo dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pengelolaan informasi publik di Kabupaten Benkalis menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) administrasi mengalami peningkatan yang signifikan. Diskominfo adalah suatu tindakan yang melibatkan pemberian pelatihan, bimbingan teknis, dan bahkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam seminar-seminar yang disponsori terkait dengan pengelolaan dan penyediaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada seluruh pihak Diskominfo. Sebaliknya kerjasama dengan media dilakukan dengan mempertimbangkan secara matang dan adil dalam pengambilan keputusan bekerjasama dengan media, karena kesalahan dalam

memilih kerjasama akan berakibat fatal bagi pengelolaan informasi publik di Kabupaten Bengkalis.

b. Upaya Transparansi

1) Daerah Yang Sulit Terjangkau Akses Jaringan Internet

Suatu tantangan dalam menghadirkan keterbukaan informasi publik di tengah-tengah masyarakat yang minim akan akses internet. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama masyarakat, Muhammad Fauzi yang menerangkan bahwa:

“Sebagai masyarakat awam, kita lebih mudah memahami informasi yang terpajang secara langsung. Seperti informasi yang dipajang disimpang-simpang atau di kedai-kedai serta ditempat umum. Terlebih daerah yang akses internet yang lambat bahkan tidak ada akses internet sama sekali, untuk memudahkan masyarakat bisa mengetahui informasi tersebut jalan satu-satunya dengan informasi yang disebarakan secara langsung”. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Mei 2023).

2) Pendidikan Masyarakat

Upaya yang bisa dilakukan pemerintah dengan terus membuka seluas-luasnya bantuan beasiswa kepada anak-anak bangsa, menanamkan sugesti pada diri anak sejak dini bahwa melalui pendidikan akan mampu merubah arah hidup lebih baik lagi. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti bersama Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bengkalis Adi Sutrisno, SE., M.AP yang menerangkan bahwa:

“Melalui pendidikan dan peningkatan wawasan sejak dini kepada anak mampu melahirkan penerus bangsa. Dengan pendidikan juga segala informasi baik mengenai ekonomi, pembangunan, dan budaya mudah di serap dan diterima ditengah-tengah masyarakat. Hal ini juga perlu campur tangan dari pemerintah seperti bantuan biaya pendidikan untuk anak kurang mampu dari segi ekonomi hingga bimbingan khusus untuk anak-anak yang kurang fisik”. (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil yang telah peneliti lakukan di atas, maka upaya Diskominfo dalam mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan informasi publik di Kabupaten Benkali, meskipun di beberapa daerah terlihat bahwa hal tersebut adalah tentang pemerataan informasi diperlukan akses internet minimal, Diskominfo memberikan informasi secara langsung dengan menyediakan beberapa layanan personal langsung seperti Diskominfo dapat melakukan aktivitas hubungan masyarakat dan memberikan informasi yang disajikan atau dibagikan di tempat umum. Sekaligus kami bertujuan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat melalui pemberian berbagai kategori beasiswa dan memberikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Pendidikan juga mendukung pemerintahan yang lebih terbuka. Diskominfo berharap melalui pendidikan masyarakat, mereka bisa lebih berpikiran terbuka dan mau melakukan perubahan.

c. Upaya Partisipasi

1) Ketidakpedulian Masyarakat

Untuk itu dalam hal pengelolaan informasi publik mengajak masyarakat untuk ikut peduli kepada arah tujuan yang ingin dicapai, dengan rendah hati dan penuh rasa hormat menggauli masyarakat tanpa memandang status sosial menyakinkan kepada mereka bahwa pembangunan dan kebijakan daerah tidak akan bisa berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mau ikut andil dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama Staff PPID, Syafri yadona, A.Md yang menerangkan bahwa:

“Diskominfo melakukan sosialisasi, pelatihan, Bimtek bahkan seminar terkait pentingnya informasi publik bagi masyarakat dengan harapan agar mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap informasi, memanfaatkan teknologi untuk penyebaran informasi yang bermanfaat”. (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

2) PPID Pembantu

Perlu adanya kerjasama yang baik antar keduanya. Jika salah satu dari PPID Pembantu tidak menjalankan tugas dan fungsinya maka akan berdampak pada Diskominfo selaku PPID Utama. Oleh karena itu untuk menguatkan lagi tekad dan komitmen bersama maka Diskominfo menggelar *Self Assesment Questionnaire (SAQ) Award* yang dilakukan pada tahun 2022 yang diadakan di Gedung Daerah Bengkulu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bengkulu Adi Sutrisno, SE., M.AP yang menerangkan bahwa:

“Diskominfo secara konsisten dan berkomitmen yang kuat untuk terus memberikan pelayanan informasi publik, sebagai wujud dari penyelenggaraan pemerintahan yang partisipasi aktif dan transparan. Pastinya pengelola PPID Pembantu harus aktif dan proaktif dalam bekerja dengan melakukan respon yang cepat terhadap permintaan informasi publik melalui PPID Utama di Diskominfo”. (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil yang telah peneliti lakukan di atas, upaya discomifotic dalam mewujudkan prinsip partisipasi dalam pengelolaan informasi publik di Kabupaten Bengkulu menantang sikap apatis masyarakat adalah sesuatu yang tidak dapat menjangkau wilayah tersebut dengan mengundang komunitas melalui ucapan langsung, surat, atau bahkan online. Perlu ditegaskan kepada masyarakat bahwa jika sikap negatif dan acuh tak acuh ini terus berlanjut, maka keadaan di kawasan tersebut akan semakin buruk dan kawasan tersebut akan menghadapi hambatan dalam pengembangan selanjutnya. Sementara itu, para pendamping PPID juga semakin aktif bekerja sama untuk memfasilitasi keterbukaan informasi publik. Masyarakat yang merupakan konsumen informasi mengandalkan PPID pendamping dalam meminta informasi publik. Oleh karena itu, jika PPID Pembantu tidak transparan maka hak masyarakat sebagai penerima informasi publik tidak akan dapat ditegakkan.

d. Upaya Profesionalisme

1) Kurangnya Alokasi Dana

Melalui bantuan dana bermassa ini di harapkan mampu membantu mengimplementasikan 8 (delapan) program unggulan. Hal ini sesuai dengan hasil

wawancara peneliti bersama Staff PPID, Syafri yadona, A.Md yang menerangkan bahwa

“Sebanyak 136 Desa dalam lingkup Pemkab Bengkalis akan disalurkan oleh Pemerintah. Indikator tahapan penyaluran, alur penyaluran monitoring dan evaluasi serta sanksi dari dana bantuan keuangan desa bermasa telah diatur dalam Perbup No 74 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bengkalis”. (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

2) Keterbatasan Komunikasi

Pemkab juga melakukan silaturahmi ke seluruh SKPD, silaturahmi ini dilakukan untuk upaya merajut kolaborasi yang sinergi untuk bersama-sama membangun Pemkab Bengkalis menjadi lebih maju dan bermarwah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bengkalis Adi Sutrisno, SE., M.AP yang menerangkan bahwa:

“Mewujudkan visi Pemkab Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera jika tidak didukung oleh seluruh maka tidak akan berjalan dengan optimal. Perlu adanya kerja sama antar PPID Pembantu atau seluruh SKPD terkait, saling menasehati jika ada kelalaian menjalankan tugas dan fungsi serta menegakkan aspek profesional dalam setiap situasi dan kondisi”. (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023).

Berdasarkan hasil peneliti melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen sebagaimana dijelaskan diatas maka dapat diketahui bahwa upaya yang dihadapi oleh Diskominfo untuk mewujudkan prinsip *profesionalisme* dalam pengelolaan informasi publik Kabupaten Bengkalis adalah kurangnya alokasi dana berakibat lemahnya pengelolaan informasi, oleh karena itu pemerintah melakukan inovasi baru dengan membuat program bantuan keuangan 1 Milyard untuk 1 (satu) kecamatan, 1 (satu) kelurahan dan 1 (satu) desa. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan dan membantu terealisasinya pengelolaan informasi yang tertunda akibat kekurangan dana. Sedangkan keterbatasan komunikasi bisa diupayakan dengan melakukan pemberdayaan antara PPID Utama dengan PPID Pembantu yaitu mengadakan rapat mingguan atau bulanan yang bertujuan agar terjalin silaturahmi yang baik dan saling memotivasi dalam menyediakan layanan informasi publik yang lebih akuntabel, transparan, partisipasi dan profesional dalam lingkungan Kabupaten Bengkalis.

SIMPULAN

Pengelolaan informasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diserahkan kepada Badan Publik Diskominfo Kabupaten Bengkalis selaku PPID Utama yang ditinjau dari perspektif *good governance*, dimana sudah dilakukan dengan cukup baik dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan profesionalisme. Disamping itu, kendala yang dihadapi oleh Diskominfo dalam mengelola informasi publik yakni Sumber Daya Manusia (SDM), prinsip transparansi, prinsip partisipasi dan prinsip *profesionalisme*. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala

yang telah dilalui, secara umum Diskominfo terus pemantauan kembali terhadap ketinggalan yang telah mereka alami. Memperbaiki kinerja dan sistem pemerintahan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tentunya diharapkan agar daerah junjungan ini bisa terbangun dan berkembang berwujud maju, bermarwah dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ari, H. (2020). *Desain Kebijakan Desentralisasi Kehutanan Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan*. Taman Karya.
- Banga, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Bank, W. (2007). *Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Memaksimalkan Peluang Baru*. The World Bank Office.
- Bengkalis, P. K. (2022, February 20). Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Bengkalis. *Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau*. <https://ppid.bengkaliskab.go.id/>
- BPKP. (2002). *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. BPKP.
- Jeff, Huther, dan Shah, A. (1998). *Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate of Fiscal Decentralization*. Policy Research Working Paper 1894, World Bank.
- Nasional, P. S. (2021). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi*. 53–57.
- Negara, L. A. (2000). *Akuntabilitas dan Governance, Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. LAN.
- PERMENPANRB NO 04 TAHUN 2007.pdf. (n.d.).
- Rahman. (2000). *Menuju Kabupaten Bengkalis Transparansi Tingkatkan Gairah Keterbukaan Informasi di Setiap Badan Publik, Diskominfo Bengkalis Luncurkan SAQ Award 2022*. <https://bengkaliskab.go.id/berita/tingkatkan-gairah-keterbukaan-informasi-di-setiap-badan-publik-diskominfo-bengkalis-luncurkan-saq-award-2022>
- Rahman. (2022, December 17). *Dinilai Patuh Serta Komitmen Dorong Keterbukaan Informasi Pemkab Bengkalis Kembali Dinobatkan Sebagai Daerah Terbaik I, Tata Kelola Layanan Informasi Publik*.
- Rosenbloom, D. H. E. all. (2005). *Contemporary Public Administration*. McGraw.
- Sedarmayanti. (2012). *Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya*. Refika Aditama.
- Soepomo, R. (2000). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. PT. Pradnya Paramita.